

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Delegasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2044. Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup.

Alizon, Miza Safitri Asril Joni. 2024. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi Kasus di Kecamatan Kuok)." *Journal of Sharia and Law* 1-14.

Batubara, 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan. 2022. Indonesia.

Consultant, Afita. n.d. "Reklamasi Pasca Tambang",. Accessed February 6, 2026. <https://afitaconsultant.co.id/reklamasi-pasca-tambang/>.

Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, and JS. Murdomo. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku "The Criminal Law Enforcement Against." *Jambura Law Review* (Jambura Law Review) 30-47 .

Eka. 2025. "Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya". Accessed February 5, 2026. <https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/>.

- Emilda Yofita, Erwin Syahrudin. 2020. "HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." *PALAR (Pakuan Law Review)* .
- Fahrudin. 2018. "Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis." *Celebes Media Perkasa* 6-28.
- Febrianto, Vicki. 2025. *antara jatim* . Desember .
<https://jatim.antaranews.com/berita/1014364/ponorogo-siapkan-langkah-penanganan-tambang-ilegal-ngebel-jenangan>.
- Gama Palias, Nam Rumkel, Ansha. 2023. "Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Journal Of Social Science Research*.
- Gandra, Moh. 2020. "'Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 95.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* . Makassar : Pustaka refleksi .
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jihan. 2024. *PDI PERJUANGAN JATIM*. Accessed February 13, 2026.
<https://pdiperjuangan-jatim.com/raperda-rtrw-disahkan-bupati-sugiri-pertambangan-dilarang-di-zona-wisata/>.
- Jundiani. 2015. " "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 ".*de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 155-168.
- Kominfo. 2025. *Jurnalis Televisi dan Anggota PWI Ajak Bunda Lisdyarita Pulihkan Lahan Bekas Tambang*. Desember. Accessed February 6, 2026.
<https://ponorogo.go.id/2025/12/18/jurnalis-televisi-dan-anggota-pwi-ajak-bunda-lisdyarita-pulihkan-lahan-bekas-tambang/>.
- M, Silalahi. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*. Keni Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Pebrianti, Charolin. 2026. *Kades Jenangan Ponorogo Jadi Tersangka Tambang Ilegal Rp 400 Juta*. Detik.com.
- Ponorogo, Redaksi Media. 2025. *15 Tambang Ilgela di Ponorogo Raup Miliaran Rupiah* . Media Ponorogo.
- Pribadi, Agung. 2022. *Kementrian ESDM* . July 12. Accessed January 4, 2026. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>.
- Rusdi. 2022. "*Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*". September. Accessed February 6, 2026. <https://nikel.co.id/2022/09/13/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>.
- . 2022. *Farisatul Amanah: Perencanaan, Poin Penting Reklamasi dan Pascatambang*. September. Accessed February 6, 2026. <https://nikel.co.id/2022/09/13/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>.
- S., Salim H. 2005. *Hukum pertambangan di Indonesia*. Chicago: RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Nandang. 2013. "Praktik Pertambangan Indonesia." *Menpress* 199-204.
- Sudrajat, Tedi. 2017. "Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan dan Jabatan ." In *Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan dan Jabatan* , by Tarmizi and Dessy Marliani Listianingsih. Jakarta .
- Suganda, Rangga. 2022. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Sugiarto, Toto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya : Jakad Media Publising .
- Sukamto Satoto, Bahder Johan Nasution. 2019. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata kelola Pemerintahan Yang Baik ." *jurnal Sains Sosio Huaniora*.

2020. *Undang-Undang No 3 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia .
2009. *Undang-Undang No 4 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara* . Indonesia .
2009. *Undang-Undang No 4 Pertambangan Mineral dan Batubara*. Indonesia .
- Wahyuni, Willa. 2022. *hukum online com* . Desember .
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian>.
- Widjaja, H.A.W. 2017. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Depok : Rajawali Pers .
- Zaelani. 2012. ""Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ." *Jurnal Peraturan go id* .

